

Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999

Akhmad Syaekhu Rakhman

¹Universitas Indraprasta PGRI
Email: a03rakhman@gmail.com

Received: 2021-01-18

Revised: 2021-01-28

Accepted: 2021-02-23

Published: 2021-02-28

Abstract

Dynamics of Political Development Nahdatul Ulama Post Khittah 1984-1999. This study aims to determine the dynamics of the development of the post-khittah ulema of the ulama in 1984-1999, in addition to that the writer also expects the reader to understand the political development of the NU. Research uses historical research methods. The method used is heuristics, criticism / verification, interpretation and historical writing. The results of the study understood the background of the nationalism renewal movement in Indonesia the birth of the Nahdatul Ulama organization in Indonesia, after the NU Khittah which returned to the path of social religious organization led by Abdurahman Wahid formed NU in the creation of democracy and reform in the country.

Keywords: *the dynamics of development, the politics of Nahdatul Ulama, the 1984-1999 post-war*

Abstrak

Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah 1984-1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan politik nahdatul ulama pasca khittah 1984-1999, selain itu penulis juga mengharapkan pembaca dapat memahami perkembangan politik NU tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah. Metode yang digunakan yaitu dengan heuristik, kritik/verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah. Hasil penelitian dipahami latar belakang terjadinya gerakan pembaruan nasionalisme di Indonesia lahirnya organisasi Nahdatul Ulama di Indonesia, Pasca Khittah NU yang kembali ke jalur organisasi sosial keagamaan di pimpin oleh Abdurahman Wahid membentuk NU dalam terciptanya demokrasi dan reformasi di tanah air.

Kata kunci: *dinamika perkembangan, politik Nahdatul Ulama, pasca khittah 1984-1999*

Copyright © 2021, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Perkembangan islam di Indonesia merupakan proses yang berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan lainnya yang sangat kompleks. Untuk sebagian dapat diterangkan melalui keterlibatan kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad XI. Intensitas kontak-kontak perdagangan itu selanjutnya menghasilkan tumbuhnya pemukiman masyarakat muslim di pesisir kepulauan nusantara. Melalui proses sejarah yang sangat panjang, cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa lambat laun islam telah menjadi bagian yang begitu dalam menguasai batin masyarakat Indonesia. Meski demikian, keberhasilan Islam menembus akar kehidupan masyarakat Indonesia, tidak berarti akar lama yang bersumber dari tradisi dan budaya setempat, hilang sama sekali. Kondisi semacam ini juga bisa diamati di bagian lain. Perkumpulan islam dengan nilai budaya setempat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan ide aslinya sendiri. Penghadapan islam dengan realitas sejarah, akan memunculkan realitas baru, bukan saja diakibatkan pergumulan internalnya menghadapi tantangan yang harus dijawab, tetapi juga keterlibatannya dalam proses sejarah

sebagai pelaku yang ikut menentukan keadaan zaman (Haidar, 1994). Dalam proses seperti ini islam tidak saja harus menjinakkan sasarannya, tetapi dirinya sendiri terpaksa harus diperjinak. Dengan demikian akan terjadi keragaman dalam islam akibat dari tuntutan ajarannya sendiri yang universal.

Dipelopori oleh ulama yang berpusat di pesantren-pesantren, organisasi ini memiliki wawasan yang keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan tertentu. Berkesinambungan menelusuri mata rantai historis sejak abad pertengahan, yaitu ahlusunnah wal jamaah. Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, menumbuhkan solidaritas dan integritas yang kuat, menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia selama bertahun-tahun. Gagasan yang pertama kali ketika Nahdatul Ulama dibentuk bukanlah dari wawasan politik, melainkan dari wawasan sosial keagamaan.

Di antara sekian banyak ormas, pada mulanya yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam (SI) yang merupakan reinkarnasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lahir pada tahun 1911. SI ini kelak menjadi Partai Sarekat Islam. Bisa dikatakan SI ini merupakan embrio dari munculnya ormas-ormas Islam pada fase berikutnya. Sejak itu kemudian bermunculan berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Persatuan Islam (Persis) di Bandung lahir 1923, Al-Irsyad di Jakarta (1914), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau Perti di Bukit Tinggi (1928), Al-Jamiyatul Washliyah di Medan (1930) termasuk NU pada tahun 1926 dan masih banyak lagi. SI ini hadir pada saat yang tepat, di mana masyarakat pada waktu itu sedang gamang dan membutuhkan basis ideologi bersama guna melampiaskan sejumlah ketidakpuasan. Sebagian masyarakat masuk SI karena perasaan anti pedagang China, ada juga lantaran anti Belanda, sebagian lagi karena anti penguasa Bumiputera. Yang lain masuk SI sebab pengaruh ideologi Pan-Islamisme dan ajaran modernisasi Islam, bahkan ada juga yang masuk SI karena harapan akan kedatangan Ratu Adil yang akan menyelamatkan mereka dari semua penderitaan dan penindasan. Nahdatul Ulama adalah organisasi ulama tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukung utamanya adalah para kiai yang berasal dari pesantren.

Sejak pembentuknya pada tahun 1926, Nahdatul Ulama menempati posisi sentral dan memainkan peranan sangat penting di kalangan masyarakat santri, terutama di pedesaan. Ia menunjukkan kemampuan membangkitkan tidak hanya kesadaran beragama di kalangan umat islam, tetapi juga kesadaran komitmen sosial dalam kehidupan kolektif umat islam. Nahdatul Ulama tidak hanya merupakan organisasi umat islam terbesar di Indonesia, tetapi juga di dunia islam. Organisasi non pemerintah ini didukung oleh ribuan pesantren yang memainkan peranan vital sebagai lembaga sosial, agama, dan pendidikan dalam masyarakat santri tradisional (Al Qurtuby, 2002).

Pada 31 Januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari lima belas kiai terkemuka berkumpul di rumah Wahab Chasbullah (1888-1971) di kertopaten, Surabaya. Sebagian besar mereka datang dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Jarang terjadi, kiai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, namun dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka dan bentuk Islam tradisional yang mereka praktikkan. Setelah melalui diskusi, mereka memutuskan mendirikan Nahdatul Ulama untuk mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda.

Keputusan itu merupakan langkah bersejarah. Sebelumnya, tokoh-tokoh tradisional

telah membentuk berbagai organisasi kecil dan bersifat lokal yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, atau keagamaan, namun baru setelah Nahdatul Ulama didirikan sebagian besar kiai mau melibatkan diri mereka dalam sebuah organisasi berskala nasional dengan program kegiatan yang luas. Nahdatul Ulama berkembang cepat pada awal 1940-an dan mengaku sebagai organisasi Islam terbesar di Hindia-Belanda. Belum pernah terjadi di mana pun dalam dunia Islam, sebuah organisasi yang dipimpin oleh para ulama berhasil menarik massa pengikut sedemikian banyak.

Setelah Belanda bubar dan diganti penjajah baru Jepang pada Maret 1942, Nahdatul Ulama mengalami masa ujian yang amat pelik. Pada masa ini banyak tokoh Nahdatul Ulama yang dijebloskan ke penjara seperti yang dialami KH Hasyim Asy'ari dan KH Mahfudh Shiddiq karena dituduh menggalang kekuatan masa untuk melawan saudara tua. Pada masa pendudukan Jepang dan menjelang detik-detik kemerdekaan ini, Nahdatul Ulama juga memegang peranan penting. Dengan lahirnya wadah baru Masyumi sebagai badan federasi organisasi-organisasi Islam ini, maka dengan sendirinya MIAI dinyatakan bubar. Pimpinan tinggi Masyumi diserahkan kepada KH Hasyim Asy'ari. Melalui Masyumi, Nahdatul Ulama terlibat aktif melakukan kerja-kerja sosial-politik menuju Indonesia merdeka tertentu ini dilakukan bersama para tokoh nasionalis dan ormas Islam. Apabila di jaman Jepang aktivitas Nahdatul Ulama terfokus pada perjuangan membela kemerdekaan agama, nusa dan bangsa, maka di masa revolusi 1945-1949 lebih diperkuat lagi. Nahdatul Ulama sadar betul bahwa sejarah masih dalam proses. Meskipun kemerdekaan sudah tercapai pertahanan nasional tidak boleh lengah.

Pada tahun 1952 Nahdatul Ulama keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik tersendiri, menyusul munculnya serangkaian kekecewaan NU terhadap Masyumi yang berkaitan dengan masalah distribusi kekuasaan dalam struktur pimpinan partai federasi (Noer: 1987). Pengubahan status baru Nahdatul Ulama sebagai parpol ini menimbulkan sejumlah asumsi dan swasangka. Satu pihak ada yang menganggap Nahdatul Ulama ini sebagai opportunistik yang hanya berorientasi kekuasaan, tetapi ada juga kelompok yang berpandangan bahwa sikap Nahdatul Ulama itu merupakan wujud dari fleksibilitas politik yang mereka mainkan. Sikap luwes dalam berpolitik ini ditunjukkan dengan beberapa kali Nahdatul Ulama menjadi bagian dari kekuasaan Bung Karno dan menggeser dominasi Masyumi. Berdekatnya dengan kekuasaan, Nahdatul Ulama berkali-kali menjadi backer rezim Soekarno untuk menghadang serangan parpol Islam yang memusuhinya, terutama Masyumi. Ketika kepemimpinan Soekarno dilegitimasi oleh sejumlah ormas/parpol Islam yang memusuhinya, terutama Masyumi. ketika kepemimpinan Soekarno dilegitimasi oleh sejumlah ormas/parpol Islam, Nahdatul Ulama kembali tampil terdepan membela Bung Karno. Pembelaan terhadap Presiden Soekarno ini diperkuat dan dipertegas pada konferensi Alim Ulama yang diselenggarakan di Cipanas, Jawa Barat pada tahun 1954 (Al Qurtuby, 2002).

Kemudian di awal tahun 1960, semua partai politik diminta mengubah anggaran dasarnya dan secara jelas menyatakan menerima Pancasila dan bersedia membelanya. Semua partai harus memiliki wawasan nasional dan tidak boleh terlibat dalam pemberontakan apapun. Nahdatul Ulama mengalami perpecahan pendapat mengenai keabsahan keikutsertaannya dalam DPR yang baru ini. Di satu pihak, KH Bishri Syamsuri, KH M Dahlan, Imran Rasyidi dan KH Ahmad Shiddiq menganggap DPR ini anti demokrasi. Bagi Kiai Bishri, ikut dalam sebuah DPR yang tidak semuanya dipilih oleh rakyat adalah tidak sah menurut fiqih.

Sementara di pihak lain yang di back up KH Wahab Chasbullah menjelaskan bahwa masuknya Nahdatul Ulama ke dalam formasi DPR yang baru itu merupakan pilihan yang memaksa sebab jika tidak, ada kemungkinan Nahdatul Ulama untuk dibubarkan atau dipangkas aksesnya dari pemerintah. Kiai wahab berdalih, Nahdatul Ulama harus masuk DPR ini untuk mengimbangi kekuatan partai-partai sekuler. Selain itu masih menurut kiai wahab berdalih, umat islam belum siap untuk konfrontasi dengan pemerintah. Kiai wahab kemudian membeberkan dalil dan kaedah fiqih untuk memperkuat argumentasinya.

Pada masa tahun 1970, jenderal Soeharto telah menunjukkan watak aslinya yang otoriter, kejam tiran dan monolitik. Pada kurun waktu itu terjadi berbagai pemberontakan separatisme di daerah-daerah akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada kemiskinan. Akibatnya sering terjadi demonstrasi dalam skala besar yang menuntut sang jenderal turun dari kursi kepresidenan. Namun berbagai aksi itu tidak di hadapi dengan lunak dan kompromistik bahkan sebaliknya Soeharto melawan dengan kekerasan dengan menggunakan apaaratus tentaranya. Peran partai politik juga dibatasi untuk tidak menyebut dikebiri. Kebijakan politik ini memaksa Nahdatul Ulama untuk masuk ke dalam wadah politik baru yang disediakan penguasa Orde Baru khusus bagi partai politik berbasis islam.

Pada tahun 1984 adalah tahun titik balik sejarah Nahdatul Ulama. Sejak itu Nahdatul Ulama menyatakan putus hubungan dengan dunia politik praktis dan berkonsentrasi pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan dasar warga negara Nahdatul Ulama seperti pendidikan, ekonomi, dakwah dan sebagainya. Rentang waktu 1984 NU lebih memfokuskan diri pada aktivitas kultural bukan lagi kepolitikan praktis. Tetapi sejauh mana kedua keputusan dipatuhi warga NU merupakan pertanyaan yang layak untuk dikemukakan. Sebab prakteknya ternyata tidak mudah melepaskan secara ekstrem warga NU dari kehidupan politik praktis kekuasaan. Mungkin lantaran sudah terlalu lama NU bersentuhan dengan politik atau bisa saja karena politik kekuasaan lebih menggairahkan dan menjanjikan dari aspek material ketimbang politik kerakyatan yang sangat melelahkan secara miskin ekonomi. Jika pada masa orde baru dulu, NU begitu tangguh sebagai pelopor gerakan kultural yang melawan arogansi dan dominasi kekuasaan mungkin karena faktor keterpaksaan sejarah lantaran jalan/ akses menuju kekuasaan sudah ditutup rapat oleh rezim penguasa. Satu-satunya jalan yang tersedia adalah kekuasaan kultural.

Sejak PBNU membidani pendirian PKB dan naiknya Gus Dur sebagai presiden RI tahun 1999 melalui voting di MPR, semangat berpolittik praktis kembali menggema di lingkungan Nahdatul Ulama. Memori masa lalu saat Nahdatu Ulama menjadi partai politik kembali terbayang. Romantisme Nahdatul Ulama dengan kekuasaan Bung Karno dan Orde Lama kembali muncul dibenak kiai. Begitu pula sebaliknya, memori lama saat dipinggirkan Soeharto dan Orde Baru mulai dikenang sebagai bagian dari sejarah Nahdatul Ulama (Al Qurtuby, 2002).

Sebagai catatan akhir, konsekuensi lain dianutnya paham ahlu sunnah wal jamaah adalah keharusan bagi seluruh warga NU untuk menghormati ulama dan mengakui kepemimpinan serta otoritasnya. Dalam hal pemilihan nama organisasi sebagai Nahdatul Ulama pun tergambar jelas posisi sentral ulama di dalamnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan politik nahdtul ulama pasca khittah 1984-1999.

Metode Penelitian

Dalam menunjang kegiatan penelitian ini, maka berikut tempat penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa lokasi penelitian. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain: 1) Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, di Jln. Nangka; 2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok-Jawa Barat; 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta; dan 4) Perpustakaan PBN, Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan (Gottschalk, 1985) melalui kajian pustaka yang berhubungan erat dengan materi pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Perkembangan NU

1. Lahirnya NU

Bangkitnya seorang ulama dan tumbuhnya suatu pesantren di masa lampau, agaknya harus melalui proses yang tidak gampang. Pada umumnya, harus dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat umumnya masyarakat pedesaan terhadap kelebihan di bidang ilmu agama (Islam), keshalihan perilaku maupun ketegasan serta keberanian seseorang ulama dalam menghadapi segala macam gangguan yang mengancam diri pribadi maupun lingkungannya. Dengan kelebihan itu, penduduk setempat kemudian banyak berdatangan untuk berguru dan memina diisi berbagai macam ilmu. Maka terjadilah proses belajar mengajar yang oleh masyarakat Jawa diberi istilah tersendiri. Ulama yang mengajarkan ilmunya disebut *kyai*, sedangkan orang yang menuntut ilmu disebut *santri*.

Oleh karena pengakuan masyarakat terhadap seorang *kyai* tidak saja sebagai orang yang dalam ilmu agamanya, tetapi lebih dari itu dianggap sebagai tempat bertanya dan meminta fatwa, maka secara tidak resmi *kyai* telah tampil sebagai pemimpin yang kharismatik. Lebih besar kharisma *kyai*, lebih banyak pula *santri* berdatangan untuk berguru. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, para *santri* yang datang tidak terbatas dari lingkungan dekat saja, tetapi juga dari jauh (Anam, 1999).

Bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan krusial seperti tingginya angka kemiskinan, praktik korupsi, mafia hukum dan konflik antar keyakinan. Persoalan ini telah melupakan proses keadaban bangsa kita, terutama bagaimana seluruh elemen bangsa membangun kesadaran yang berlandaskan moralitas yang menjadi dasar dari keadaban suatu bangsa disingkirkan dalam ranah publik. Tak heran jika keadaban bangsa sedang dipertaruhkan dengan himpitan sosial-ekonomi, politik, dan agama. Disinilah kekuatan masyarakat memiliki peran yang besar dalam usaha mencegah proses pelapukan keadaban bangsa (Zada, 2010).

Ada dua organisasi Islam besar yang dianggap mewakili Muslim *santri* di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) yang sering kali dianggap mewakili golongan tradisional dan Muhammadiyah yang dianggap mewakili golongan modernis. NU adalah organisasi ulama tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukung utamanya adalah para *kiai* yang berasal dari dan memimpin pesantren. Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengarungi dunia perpolitikan banyak mengalami pasang surut. Nahdlatul Ulama yang awal berdirinya sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari beserta para ulama pesantren lainnya dengan haluan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaah telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi bergabung dalam Masyumi (Fadeli, 2007).

Akibat kekecewaan yang dialami di dalam tubuh NU, maka timbul gagasan untuk kembali ke Khittah 1926. Pemikiran untuk kembali ke Khittah yang dilontarkan oleh KH. Ahmad Shiddiq pada muktamar ke 27 di Situbondo. Intisari paham atau ajaran yang sudah berkembang dan akhirnya disebut Khittah NU 1926. Ini oleh para Ulama pendiri dituangkan dan disalurkan kedalam NU, untuk diwarisi dan dilestarikan sebagai “trayek” (garis perjalanan) bagi organisasi ini. Secara garis besar ini dari Khittah NU adalah mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis (Anam, 2006).

2. Tujuan berdirinya Nahdatul Ulama

Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah⁷ yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.⁸ Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: 1) Di bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar; 2) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa dan berbudi luhur berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara; 3) Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan; dan 4) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah (PWNU Jawa Timur, 2007).

3. Tokoh Pendiri Nahdatul Ulama

Tokoh-tokoh pendiri awal Nahdatul Ulama

- 1) K.H. Hasyim Asy'ari (1817-1947), Tebu Ireng Jombang, Pendiri NU dan Rais Akbar (1926-1947)
- 2) K.H Bisri Syamsuri (1886-1880), Denayar Jombang, Pendiri NU, A'wam Pertama (1926) dan Rais Aam (1971-1980)
- 3) K.H Abdullah Wahab Chasbullah (1888-1971), tambak beras jombang, pendiri NU, Katib pertama (1926) dan Rais Aam (1947-1971)
- 4) K.H Abdul Chamid Faqih, Sedayu Gresi, Pendiri NU dan Pencipta lambang NU “Nuhudlul Ulama”
- 5) K.H Ridwan Abdullah (1884-1962), Surabaya Pendiri NU dan Pencipta lambang NU
- 6) K.H Abdul Halim Leuwimunding, Majalengka, Cirebon, Pendiri NU
- 7) K.H. Mas Alwi bin Abdul Aziz, Surabaya, Pendiri NU dan Pencipta nama NU “Nahdatul Ulama”
- 8) K.H Ma'shum (1870-1972) Lasem Pendiri NU
- 9) K.H. A Dachlan Achjad, Malang, Pendiri NU dan Wakil Rais Pertama (1926)
- 10) K.H Nachrowi Thahir (1901-1980) Malang, Pendiri NU dan A'wan Pertama (1926)
- 11) K.H R Asnawi (1861-1959), Kudus, Pendiri NU dan Mustasyar pertama (1926)

- 12) Syekh Ghana'im (tinggal di Surabaya asal dari Mesir), Pendiri NU dan Mustasyar pertama (1926)
- 13) K.H. Abdullah Ubaid (1899-1938), Surabaya, Pendiri NU dan A'wan Pertama (NU online.com, 20 Desember 2018. Pukul 13.30)

B. Gagasan dan Pemikiran NU kembali ke khittah

1. Perkembangan NU Sebelum Orde Baru

Keterlibatan NU dalam dunia politik semakin terlihat ketika NU bergabung dalam Masyumi sebagai partai politik. Namun kedudukan NU dalam kepengurusan Masyumi tidak terwakili di badan eksekutif dan hanya menduduki dewan syuro yang tidak banyak menentukan terhadap kebijakan partai bahkan sampai akhirnya dewan syuro diturunkan, kedudukannya hanya menjadi penasihat partai. Keretakan ditubuh Masyumi akibat berbagai polemik membuat NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Setelah keluar dari Masyumi, NU secara institusi telah siap berubah orientasi visi dan misi jika semula NU sebagai organisasi keagamaan maka sekarang menjadi organisasi politik (M.C Ricklefs, 2016).

NU sejak lama telah curiga dan membenci PKI, kebencian NU semakin menjadi ketika PKI melancarkan gerakan yang dikenal dengan aksi sepihak. Kader-kader PKI terutama aktivis-aktivis organisasi tani BTI (Barisan Tani Indonesia) secara sepihak memaksa pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani-petani diberbagai desa khususnya di pulau Jawa. (Anam, 1985). Memasuki era Orde Baru, NU memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap setelah dalam beberapa hari saja jenderal Soeharto berhasil menumpas G 30 S. di samping keikutsertaan para aktivis radikalnya dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambil alihan kekuasaan secara konstitusional oleh jenderal Soeharto. Bagi para jenderal yang menekankan keabsahan peralihan, NU merupakan satu-satunya pasangan yang dapat dijadikan tumpuan harapan. Partai Nasional terlalu dekat hubungannya dengan Soekarno, Masyumi menjadi partai terlarang tahun 1960 dan diawasi pemerintah, sementara partai-partai lainnya terlalu kecil untuk berperan. (Anam, 1985).

2. Gagasan awal NU Kembali ke Khittah

Munas Situbondo tahun 1983 dan Mukhtar Situbondo tahun 1984 menunjukkan terjadinya perubahan besar di tubuh NU yang ditandai dengan rekonsiliasi NU dengan rezim Orde Baru serta ditandai pula dengan munculnya elit baru di puncak pimpinan NU. Tahun 1984 adalah tahun titik balik bagi sejarah NU. Betapa tidak pada tahun tersebut NU memutuskan kembali ke khittah 1926 yang berarti secara tegas NU memutuskan keluar dari zona politik praktis para kiai dan politisi yang berasal dari NU diberi kebebasan untuk berafiliasi dengan partai politik pada waktu itu ditujukan kepada Golkar dan PPP manapun yang mereka mau. Pada tahun itu pula NU balik kandang menjadi Jamiyah Diniyah yang lebih berkontribusi kepada persoalan yang berkaitan pada persoalan sosial-kemasyarakatan, dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga NU, seperti pendidikan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya.

Keputusan menarik diri dari politik praktis dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal membuat NU tidak diragukan lagi paling tidak untuk sebagian pendapat adalah sebagai respon terhadap tekanan politik dari luar. Seiring dengan kembalinya NU ke "khittah" terjadi pula perubahan yang begitu mengejutkan di tubuh ormas yang berlogo tali jagat itu. Di kalangan generasi muda NU terlihat adanya dinamika yang sama sekali baru, yang ditandai dengan menjamurnya aktivitas intelektual yang nyaris tak tertandingi oleh masyarakat lain.

Gelombang munculnya gagasan kembali ke khittah 1926, dalam beberapa literatur disebutkan telah diawali sejak tahun 1959, saat NU menyelenggarakan Mukhtar ke 22 di Jakarta. Mukhtar yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Desember tersebut terasa dekat dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Secara langsung, keduanya memang tidak ada korelasinya,

namun jika ditilik dari posisi NU yang akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan Bung Karno (Presiden Sukarno), disamping NU adalah partai besar yang mewakili suara islam, maka kiranya sulit menerima sebuah gagasan yang tidak berpolitik dalam arti kekuasaan. Selama sekitar dua puluh tahun, gagasan untuk mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan belum berhasil menemukan hasil kongkrit. Usul-usul yang dilontarkan selalu kandas dan lenyap begitu saja. Baru dalam Mukhtamar ke 26 di Semarang tahun 1979, gagasan itu memperoleh dukungan cukup kuat, baik dari kalangan ulama, terlebih dari kalangan muda profesional maupun pembaharuan NU (Sumanto, 2014).

3. Penjelasan tentang khittah NU

Khittah Nahdatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham islam ahlusunnah wal jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah Nahdatul Ulama juga digali dari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa (Icwan, 1985).

Jika melihat sikap politik NU butir khittah 1926 yang diputuskan saat mukhtamar Krapyak di atas jelaslah bahwa NU sejak 1984 lebih memfokuskan diri pada aktivitas kultural bukan lagi kepolitikan praktis. Tetapi sejauh mana kedua keputusan tersebut dipatuhi warga NU merupakan pertanyaan yang layak untuk dikemukakan. (Al Qurtuby, 2014).

C. KH. Abdurahman Wahid dan Nahdatul Ulama dalam Kondisi Sosial Politik di Tahun 1984-1999

1. Peranan KH. Abdurahman Wahid saat menjadi ketua PBNU

Masa pemerintahan Gus Dur yang berlangsung selama tiga periode memang membawa angin segar bagi NU. Kebebasan berfikir dan bersuara bagi semua warga NU membuat organisasi ini dapat kembali bangkit dari keterpurukan ini terlihat dengan banyaknya bermunculan organisasi non pemerintahan yang otonom di lingkungan masyarakat NU. Namun dari sisi lain, Gus Dur juga tidak dapat dikatakan berhasil dalam mengelola sepenuhnya organisasi ini. Hal ini terlihat ketika ia menjadi ketua umum PBNU pada desember 1984, ia memang mewarisi suatu organisasi yang terpecah belah dan kedodoran. Keadaan organisasi ini sedemikian buruk sehingga manajer yang paling cakap akan mengalami kesulitan untuk membereskan administrasi organisasinya. Gus dur bukanlah seorang manajer yang cakap dan bahkan setelah 5 tahun terlewatkan, ia hampir tidak melakukan apa-apa terhadap struktur organisasi NU. Oleh karena itu menjelang mukhtamar 1989, tidaklah jelas sama sekali apakah ia akan kembali terpilih atau tidak.

2. Kondisi Sosial Politik

Abdurrahman Wahid, sebagai pemimpin NU merupakan politikus yang provokatif dan terkemuka di Indonesia. Perjuangannya untuk demokrasi, pengakuan internasional, latar belakang keluarga, dan kualitas-kualitas personal semuanya menyatu untuk memberinya peran sentral dalam perdebatan politik di indonesia.

Secara historis, tidak dipungkiri sosok Abdurahman Wahid telah mengantarkan nahdiliyin pada titik kulminasi yang menggembirakan, baik secara politik maupun intelektualitas. Berbekal khittah 1926, Gus Dur atau Abdurahman Wahid telah mendesain NU menjadi model civil society yang menakjubkan (Suhanda, 2010). Meski tidak banyak yang dilakukan Abdurahman Wahid dalam bidang politik, pandangan-pandangannya dalam statemen politik sering mengagetkan orang. Tidak heran, jika banyak yang menentanginya meski banyak pula yang mendukungnya. Sejumlah tokoh senior NU, termasuk pamannya sendiri, Yusuf Hasyim, acapkali menentang berbagai inisiatif dan pernyataan Wahid.

Kebekuan Abdurrahman Wahid dengan Soeharto sedikit mencair ketika keduanya

berjabat tangan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), 2 November 1996, di Pondok pesantren Zainul Hassan, Genggong, Probolinggo. Dalam acara ini untuk pertama kali semenjak Mukhtar Cipasung, 1994, Abdurrahman Wahid bersalaman dengan Soeharto, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa itu merupakan bentuk koreksi atas koreksi dari sikap Soeharto selama ini (Wahid, 1999).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Nahdatul Ulama (NU) memiliki daya lentur terhadap perubahan sosial yang terjadi di sekelilingnya, dan tidak menutup diri terhadap perubahan tersebut. Pada awalnya NU yang didirikan para ulama pada tahun 1926 tersebut merupakan organisasi sosial keagamaan, tetapi kemudian NU melibatkan diri dalam kegiatan politik Bersama-sama organisasi Islam lainnya, NU mendirikan Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang merupakan alat persatuan umat Islam di masa-masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah MIAI berakhir, NU dan Organisasi Islam lainnya (PSII, Perti, Muhammadiyah) membentuk suatu federasi baru dengan nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Sekitar tahun 1952, NU memulai babak baru di jalur politik setelah keluar dari Masyumi. Walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangannya, namun sebagai partai politik, NU ternyata berhasil menduduki "empat partai besar" (PNI, Masyumi, NU dan PKI) dalam pemilu pertama (1955). Hal ini merupakan suatu keberhasilan NU sebagai suatu organisasi dengan basis pesantren. Namun kemudian, perkembangan pada tahun 1970-an, ketika diberlakukan penyederhanaan partai, posisi NU sebagai partai politik menjadi sangat kecil setelah berfungsi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak saat itu aspirasi politik NU dimandatkan kepada PPP.

Bertolak dari itu, munculnya gagasan kembali ke khittah 1926 yang kembali di populerkan dan secara kongkrit dirumuskan K.H Achmad Siddiq yang mewakili eksponen kiai. Serta gagasan ilmiah "Tim Tujuh" dapat dipandang sebagai jalan terobosan yang tepat dan strategis bagi pemulihan tujuan NU. Rumusan khittah 1926 yang telah menjadi keputusan resmi NU lewat Mukhtar Situbondo 1984, dengan demikian menjadi landasan berjuang dan berpikir organisasi serta warga NU secara umum.

Setelah NU menyatakan netral dalam politik praktis, dan dipimpin oleh Abdurrahman sebagai tokoh pemimpin PBNU perkembangan yang dicapai oleh NU untuk memajukan kehidupan sosial demikian pesat. Seperti di bidang politik, Abdurrahman Wahid telah memberikan warna corak politik NU yang khas untuk maju ke dalam percaturan politik Indonesia. serta dalam sektor ekonomi Abdurrahman Wahid telah mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusuma yang bekerjasama dengan kkaum non pribumi.

Referensi

- Affandi, Idrus. (1996). *Organisasi kemasyarakatan*. Bandung: UPI
- Al Qurtuby, Sumanto. (2002). *Nahdatul Ulama Dari Politik Kekuasaan sampai Pemikiran Keagamaan*. Semarang: Elsa Press
- Anam, Choirul. (1985). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*. Solo: Jatayu
- Budairy, Said. (1994). *Nahdatul Ulama dari Berbagai Sudut Pandang*. Jakarta: LAKPESDAM

- Budiarjo, Miriam. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- Duverger, Maurice. (1972). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Yayasan ilmu ilmu sosial
- Fealy, Greg. (2003). *Ijtihad Politik Ulama NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS
- Feillard, Andre. (1999). *NU vis-à-vis Negara: Pencarian isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta:LKIS
- Gottschlak, Luis. (2006). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss)
- Greg Barton dan Greg Fealy. 1991. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: Lkis
- Ichwan, Mohammad. (1985). *Khittah Nahdatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr
- Jonshon, P. Frank. (2012). *Dinamika Kelompok dan Teori dan keterampilan*. Bandung:PT Indeks
- Maswardi, Rauf. (2001). *Konsesus dan Partai Politik*. Jakarta: Direktorat jenderal pendidikan tinggi Depdiknas.
- Munir, Fuadi. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Noer, Delier Ijtihad Politik Ulama NU. (1991). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: IKAPI
- Noer, Delier. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3S
- PWNU Jawa Timur. (2007). *Aswaja an-Nahdah*. Surabaya: Khalista
- Ricklefs, M.C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sanit, Arbi. (1995). *Ormas dan Politik*. Jakarta: LSIP
- Situs Online <http://id.NUonline.com/suara Nahdatul Ulama>
- Slamet, Santoso. (2009). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Subhan, Muhammad. (2007). *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista
- Suhanda, Irwan. (2010). *Gus Dur Santri Par Excellence*. Jakarta: Kompas
- Suwendi. (1999). *GEGER di "Republik" NU*. Jakarta: Kompas
- Van Brusinnessen, Martin. (1994). *NU Tradisi Relasi Kuasa*. Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: Lkis
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Mengurangi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo
- Wahid, Marzuki. (1999). *Dinamika NU "Perjalanan sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri*. Jakarta: Kompas
- Zada, Khamami. (2010). *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Kompas
- Zulkarnain, Wildan. (2013). *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksa